

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

ANALISIS PERAN DEMOKRASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Lyrra¹, Ernanda Auliya Putri², Risa Anisa Putri³, Anas Malik⁴

¹⁻⁴Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung,

Email : lirabl9@gmail.com

ABSTRACT :

This research aims to analyze the role of democracy and economic growth in improving people's welfare. Democracy plays an important role in creating space for inclusive public participation and ensuring accountability in policy making so that it can promote social conditions and equal distribution of resources. In addition, inclusive economic growth is the main foundation for providing quality public services and creating jobs and reducing poverty. However, this research also reveals challenges in the form of inequality in the distribution of wealth and access to political participation which can hinder the achievement of equitable prosperity. Through an analytical approach to the relationship between democracy and economic growth, this research suggests increasing political and economic literacy, strengthening governance, implementing fair redistributive policies and increasing access to public services. The results of this research show that the synergy between inclusive democracy and just economic policies is able to create sustainable societal prosperity.

Keywords: *Democracy, Growth, Community Welfare, Inequality*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran demokrasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi berperan penting dalam menciptakan ruang partisipasi publik yang inklusif dan memastikan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan sehingga mampu mendorong keadaan sosial dan pemerataan sumber daya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi pondasi utama dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan menciptakan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan. Namun penelitian ini juga mengungkap adanya tantangan berupa ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap partisipasi politik yang dapat menghambat pencapaian kesejahteraan secara merata. Melalui pendekatan analitis terhadap hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini menyarankan peningkatan literasi politik dan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan, implementasi kebijakan redistributif yang adil serta meningkatkan akses layanan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sinergi antara demokrasi inklusif dan kebijakan ekonomi yang berkeadilan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Kata kunci : Demokrasi, Pertumbuhan, Kesejahteraan Masyarakat, Ketimpangan

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

PENDAHULUAN

Hubungan antara demokrasi, pertumbuhan ekonomi dan kegiatan masyarakat telah menjadi topik kajian yang menarik dalam studi sosial dan ekonomi. Demokrasi sebagai sistem politik sering dikaitkan dengan transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah yang dapat menciptakan kebijakan publik yang lebih inklusif yang mana pertumbuhan ekonomi memberikan dasar material bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan akses terhadap infrastruktur.

Demokrasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua elemen penting Yang mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat. Negara negara dengan sistem demokrasi sering menghadapi tantangan untuk menciptakan keseimbangan antara kebijakan politik dan prioritas ekonomi sementara itu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak selalu berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata yang mana memahami interaksi antara keduanya menjadi penting untuk menentukan strategi pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada Bagaimana demokrasi dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi Kesejahteraan masyarakat. Demokrasi diyakini menciptakan mekanisme yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sedang pertumbuhan ekonomi memberikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kedua faktor tersebut dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif.

Meskipun demokrasi dan pertumbuhan ekonomi dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat beberapa paradoks contohnya beberapa negara demokrasi tetap menghadapi tingkat ketimpangan yang tinggi sementara beberapa negara otoriter berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana demokrasi dan pertumbuhan ekonomi benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara demokrasi, pertumbuhan ekonomi dan selain itu penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas demokrasi dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

kesejahteraan yang merata melalui pemahaman dinamika ini penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dan membuat kebijakan baru. Penelitian ini memiliki nilai signifikan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran demokrasi dan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan sosial dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pemerintah, organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di negara-negara berkembang (Saputra *et al.*, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam hubungan antara demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap dinamika, pengalaman, dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Fokus penelitian ini adalah pada fenomena sosial-politik dan ekonomi yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan data numerik saja, melainkan membutuhkan analisis deskriptif dan interpretatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ahli politik, ekonom, dan akademisi yang memahami keterkaitan antara demokrasi dan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan kebijakan, publikasi jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang holistik mengenai isu yang diteliti (Agustinus Gulo, 2023).

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *Kraton* yang berarti kekuasaan yang secara harfiah diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Berdasarkan konsep modern demokrasi merujuk pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat yang dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih di mana esensi demokrasi terletak pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan individu

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

dan partisipasi publik dalam proses politik. tentang Prinsip utama demokrasi melibatkan kebebasan berpendapat, kesetaraan di depan hukum, dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa jenis demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah sistem dimana rakyat secara langsung mengambil keputusan atas suatu kebijakan sedangkan demokrasi tidak langsung dilakukan melalui perwakilan seperti parlemen atau kongres. Saat ini mayoritas negara di dunia menggunakan demokrasi tidak langsung karena lebih praktis untuk diterapkan dalam masyarakat yang besar dan kompleks namun prinsip partisipasi tetap dijaga melalui pemilu, referendum atau konsultasi publik.

Era globalisasi demokrasi terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi di mana media sosial misalnya telah memberikan platform baru bagi masyarakat untuk menyuarakan Pendapat tetapi juga membawa resiko penyebaran informasi palsu yang mana untuk menjaga kualitas demokrasi diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan sistem inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat (Souwakil, 2024).

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu. Indikator utama pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produk domestik bruto (PDB). Teori pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu topik penting dalam ilmu ekonomi karena membantu memanfaatkan faktor-faktor yang mendorong peningkatan kemakmuran suatu negara di mana sejarahnya Teori ini telah berkembang mulai dari teori klasik hingga teori modern yang lebih kompleks.

Teori pertumbuhan ekonomi klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith dan David Ricardo menekankan pentingnya faktor produksi seperti tanah, Tenaga Kerja dan modal. Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* Menjelaskan konsep tangan tak terlihat yang menggambarkan bagaimana pasar bebas dapat mengarahkan sumber daya secara efisien. Sementara David Ricardo menambahkan pentingnya teori keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional untuk mendorong pertumbuhan.

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

Teori neoklasik yang dipopulerkan oleh Robert Solow, Memperkenalkan faktor teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Model Solow menunjukkan bahwa investasi dalam modal fisik dan manusia hanya memberikan dampak sementara sedangkan inovasi teknologi memberikan Efek permanen terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini juga menjelaskan fenomena konvergensi di mana negara-negara berkembang cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan negara maju hingga mencapai tingkat pendapatan yang sama.

Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan pada 1980-an oleh Paul Romer dan Robert Lucas mengkritik teori neokrasi karena mengabaikan peran internal dalam menciptakan inovasi. Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas sedangkan dalam model ini pengetahuan dianggap sebagai faktor produksi yang tidak terbatas dan dapat terus berkembang melalui kolaborasi dan inovasi.

Namun, pertumbuhan ekonomi juga menghadapi tantangan seperti ketimpangan pendapatan, degradasi lingkungan dan ketergantungan pada sumber daya alam. Oleh karena itu konsep pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi fokus dalam diskusi modern di mana pertumbuhan berkelanjutan menekankan perlunya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan dan keadilan sosial untuk menghasilkan kemakmuran jangka panjang bagi generasi mendatang (Mayasari & Mahinshapuri, 2022).

2.3 Hubungan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Demokrasi mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan institusi yang mana dalam sistem demokrasi institusi hukum dan ekonomi biasanya lebih kuat memastikan perlindungan hak properti dan penegakan kontrak yang adil. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan inovasi. Selain itu, Kebijakan demokratis mendorong pendidikan dan infrastruktur 2 elemen penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, hubungan ini tidak selalu linier yang mana demokrasi juga menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan politik, konflik kepentingan dan birokrasi yang lambat sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan dalam beberapa kasus negara dengan sistem otoriter menunjukkan pertumbuhan

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

ekonomi yang cepat karena kemampuan mereka mengambil keputusan ekonomi tanpa hambatan politik yang kompleks.

Studi empiris menunjukkan variasi dalam hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Negara negara seperti Amerika Serikat dan Jerman menunjukkan Bagaimana demokrasi stabil mendukung pertumbuhan ekonomi dan di sisi lain Cina sebagai negara Non demokrasi menunjukkan pertumbuhan pesat melalui model pembangunan otoriter tetapi dengan risiko ketimpangan sosial yang lebih tinggi (Riyanto & Kovalenko, 2023).

2.4 Kesejahteraan Masyarakat : Definisi dan Indikator

Kesejahteraan masyarakat mencerminkan Kondisi kehidupan individu dan komunitas yang memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pendapatan dan keamanan. Konsep ini mencakup aspek material dan non material seperti kebahagiaan, kualitas lingkungan dan kesetaraan sosial. Berdasarkan konteks pembangunan, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah dan institusi lainnya. Indikator kesejahteraan masyarakat biasanya dikelompokkan ke dalam dimensi sosial, . ekonomi dan lingkungan.

Indikator sosial meliputi tingkat pendidikan, akses pelayanan kesehatan dan harapan hidup. Indikator ekonomi mencakup pendapatan perkapita, tingkat kemiskinan dan pengangguran. Indikator lingkungan melibatkan kualitas udara, air dan data ini digunakan untuk mengukur perkembangan kesejahteraan secara menyeluruh.

Pemerintah memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik yang tepat contohnya dengan melakukan investasi dalam pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi selain itu kebijakan redistribusi pendapatan melalui pajak progresif dan subsidi dapat membantu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Salah satu tantangan utama dalam mengevaluasi Kesejahteraan adalah kurangnya data yang akurat dan konsisten dan Selain itu pendekatan berbasis GDP sebagai ukuran kesejahteraan sering dikritik karena tidak mencakup aspek non ekonomi seperti kebahagiaan dan kualitas hidup. Perubahan iklim,

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

ketimpangan dan konflik sosial juga menjadi hambatan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Mahmudah & Hastriana, 2024)

2.5 Teori Kausalitas : Demokrasi, Ekonomi, dan Kesejahteraan

Teori kausalitas menjelaskan hubungan sebab akibat antara demokrasi, pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan konteks kausalitas demokrasi dianggap menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Inovasi dan investasi. Sistem demokrasi biasanya mendukung hak kepemilikan, stabilitas politik, dan supremasi hukum, yang semuanya berkontribusi pada ekonomi. Selain itu, dalam demokrasi, kebijakan redistribusi sering lebih adil, yang membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga dapat mendorong demokrasi. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap hak politik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah cenderung meningkat. Hal ini sering terlihat di negara - negara yang mengalami transformasi dari sistem otoriter ke demokrasi setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu. Kesejahteraan masyarakat adalah hasil akhir dari interaksi demokrasi dan ekonomi yang baik. Demokrasi memungkinkan distribusi sumber daya yang melebihi merata sementara pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kombinasi ini menciptakan kondisi sosial yang lebih adil, seperti akses ke pendidikan, kependidikan dan perlindungan sosial.

Meskipun teori kausalitas menawarkan Kerangka kerja yang logis hubungan antara demokrasi, ekonomi dan kesejahteraan tidak selalu sederhana. Faktor - faktor eksternal seperti globalisasi, konflik dan perubahan iklim dapat mempengaruhi dinamika ini sehingga pemujaan empiris dan adaptasi kebijakan berdasarkan konteks lokal sangat penting untuk mewujudkan keseimbangan antara ketiganya (Pradana, 2020).

2.6 Peran Institusi dalam Demokrasi dan Ekonomi

Institusi merupakan pilar utama demokrasi karena berfungsi untuk menegakkan supremasi hukum, menjamin transparansi dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Intitusi seperti lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif memainkan peran penting dalam menciptakan sistem

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

pemerintahan yang stabil dan percaya yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi. Intitusi ekonomi yang kuat mendukung pertumbuhan dengan lingkungan yang kondusif bagi investasi, Inovasi dan Perdagangan contohnya institusi yang melindungi hak kepemilikan dan mengatur pasar dengan adil akan mendorong perilaku usaha untuk berkontribusi pada perekonomian. Ketika institusi ini bekerja dengan baik hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Institusi juga berperan dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Misalnya institusi pendidikan dan kesehatan yang efektif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sementara institusi keuangan yang inklusif memungkinkan akses yang lebih luas kelainan perbankan dan kredit. Banyak negara berkembang seringkali institusinya mengalami kelemahan dan korupsi yang menghambat demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Reformasi institusi menjadi langkah penting untuk memperkuat demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif. Pendekatan ini melibatkan peningkatan transparansi, penghapusan korupsi dan penguatan partisipasi masyarakat. Institusi yang kuat adalah fondasi dari demokrasi dan ekonomi yang sehat dimana tanpa institusi yang efektif demokrasi mudah terancam oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi yang cenderung mengalami stagnasi. Oleh karena itu pembangunan institusi yang berorientasi pada akuntabilitas dan inklusivitas harus menjadi prioritas utama bagi negara-negara yang ingin mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Hudi, 2020).

2.7 Tantangan dalam Mewujudkan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi dan pedoman ekonomi yang terdapat tidak kestabilan politik di mana transisi menuju demokrasi seringkali diwarnai oleh konflik internal, kurangnya kepercayaan masyarakat dan pertentangan kepentingan antara kelompok politik sehingga ketidakstabilan ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan ekonomi yang efektif. Korupsi adalah tantangan dasar lainnya yang menghambat hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi beberapa kasus demokrasi justru membuka peluang bagi kelompok tertentu untuk menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi contohnya

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan membatasi alokasi sumber daya yang efisien.

Meskipun demokrasi sering dikaitkan dengan pemerataan, dalam praktiknya banyak negara demokrasi yang masih menghadapi masalah ketimpangan ekonomi yang signifikan contohnya ketimpangan ini menyebabkan prestasi sosial dan mengurangi legitimasi sistem demokrasi dan hal ini menjadi tantangan dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Globalisasi juga membawa tantangan bagi demokrasi dan ekonomi terutama bagi negara-negara berkembang tekanan dari pasar global seringkali memaksa pemerintah untuk membuat keputusan ekonomi yang tidak populer yang dapat memicu ketidakpuasan masyarakat dan juga ketergantungan pada investasi asing dapat membatasi kebijakan ekonomi yang mandiri. Berdasarkan hal ini untuk mengatasi tantangan penting bagi negara-negara demokrasi untuk meningkatkan kualitas institusi dan kebijakan publik. Reformasi institusi, penguatan supremasi hukum dan pendidikan politik yang baik dapat membantu mengurangi risiko ketidakstabilan. Oleh karena itu hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi dapat lebih harmonis memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (R. Stevanus Bayu Mangkurat, 2021).

PEMBAHASAN

3.1 Peran Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Publik

Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai salah satu alat paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan dimana ketika ekonomi suatu negara tumbuh terjadi peningkatan dalam pendapatan nasional yang dapat digunakan untuk memperluas akses terhadap pekerjaan, pendidikan sebagaimana dalam waktu jangka panjang pertumbuhan ekonomi menciptakan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Salah satu cara pertumbuhan ekonomi membantu mengurangi kemiskinan adalah melalui penciptaan lapangan kerja dan ketika perusahaan berkembang mereka membutuhkan tenaga kerja tambahan yang membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pekerjaan. Pendapatan dari pekerjaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pendidikan sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka.

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

Pertumbuhan ekonomi juga memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak pajak yang kemudian dapat dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan melalui pendapatan negara yang lebih besar pemerintah dapat memperluas program perlindungan sosial seperti subsidi pangan, bantuan kesehatan atau pendidikan gratis bagi kelompok miskin hal ini membantu menciptakan jaringan pengaman sosial yang melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan ekstrem.

Namun, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada distribusi manfaatnya. Jika pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok kaya ketimpangan sosial juga dapat meningkat karena itu penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif, dengan mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki dampak langsung pada masyarakat miskin, seperti pertanian, usaha kecil, dan infrastruktur pedesaan.

Selain itu, pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi memerlukan pendekatan yang berkelanjutan. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam untuk mengetahui pertumbuhan jangka pendek dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang pada akhirnya justru memperburuk kemiskinan. Oleh karena itu strategi pertumbuhan yang seimbang antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan dan keadilan sosial sangat penting untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan (Adam *et al.*, 2023).

3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Demokrasi memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi publik karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mana salah satu prinsip utama Demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, memilih pemerintah. Proses ini memungkinkan masyarakat berkontribusi langsung terhadap pembentukan kebijakan yang mencerminkan kepentingan bersama. Partisipasi publik dalam demokrasi diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti pemilu, musyawarah dan forum konsultasi. Pemilu yang bebas dan adil memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memilih pemimpin yang mereka anggap paling mampu

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

mewakili kepentingan mereka. Selain itu musyawarah atau dialog publik dapat menciptakan ruang bagi warga untuk berdiskusi secara terbuka tentang isu-isu penting seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan kesehatan.

Media sosial dan teknologi informasi juga memerankan peran penting dalam meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi modern. Melalui platform digital masyarakat dapat menyampaikan pendapat, mengorganisasi gerakan sosial atau memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ruang digital ini tidak disarankan untuk penyebaran informasi palsu atau ujaran kebencian yang dapat merusak demokrasi. Pendidikan politik menjadi elemen kunci dalam memastikan partisipasi publik yang efektif. Tanpa pemahaman yang baik tentang sistem demokrasi masyarakat mungkin cenderung pasif atau mudah dimanipulasi oleh aktor-aktor politik tertentu. Oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi politik melalui kampanye, seminar dan program pendidikan.

Namun, partisipasi publik dalam demokrasi juga menghadapi beberapa tantangan seperti apatisme politik, ketimpangan akses informasi atau tekanan dari kelompok tertentu. Untuk mengatasi hal ini diperlukan komitmen Pemerintah untuk menciptakan sistem yang inklusif, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu partisipasi publik dapat menjadi kekuatan yang memperkuat demokrasi dan menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Alisha & Yulhendri, 2021).

3.3 Hubungan Demokrasi dan Keadilan Sosial

mengakses sumber daya dan layanan publik.

Selain itu, demokrasi mendorong akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya negara melalui adanya transparansi dan mekanisme checks and balance demokrasi mengurangi risiko korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat serta hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik dialokasikan secara adil dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

Namun meskipun demokrasi memberikan fondasi untuk keadilan sosial implementasinya sering menghadapi tantangan contohnya ketimpangan ekonomi yang tinggi, rendahnya literasi politik atau dominasi kelompok elit dalam proses politik dapat menghambat upaya menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dari keseluruhan elemen masyarakat untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa prinsip keadilan sosial menjadi prioritas dalam setiap kebijakan.

Demokrasi yang sehat berfungsi dengan baik dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai keadaan sosial Hal ini memerlukan kombinasi partisipasi akan bermasyarakat, pemerintah yang responsif dan sistem hukum yang adil serta hal ini mendukung demokrasi dan keadilan sosial dapat Berjalan seiring dan menceritakan masyarakat yang lebih eksklusif beserta harmonis (Heldi *et al.*, 2021).

3.4 Kontribusi Ekonomi terhadap Infrastruktur dan Layanan Publik

Pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik ketika perekonomian suatu negara tumbuh pendapatan nasional meningkat dan memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk Membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit dan sekolah. Infrastruktur yang memadai pada gilirannya mendorong produktivitas ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Investasi dalam infrastruktur seringkali menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi karena infrastruktur merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan jangka panjang. Jalan dan transportasi yang baik Misalnya memperlancar distribusi barang dan jasa sementara fasilitas listrik dan air bersih mendukung aktivitas industri dan kebutuhan rumah tangga melalui infrastruktur yang kuat daya saing suatu negara di pasar global juga akan meningkat.

Namun hubungan antara pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan layanan publik juga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan sumber daya oleh pemerintah jika anggaran tidak dikelola dengan transparansi atau efisiensi manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak akan dirasakan secara merata oleh masyarakat sehingga tata kelola yang baik menjadi kunci untuk

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

memastikan bahwa investasi dalam infrastruktur dari layanan publik memberikan dampak yang maksimal. Berdasarkan waktu jangka panjang pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan siklus positif yang berkelanjutan. Infrastruktur yang baik mendorong aktivitas ekonomi sementara layanan publik yang berkualitas meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan sehingga pendekatan yang tepat kontribusi ekonomi terhadap infrastruktur dan layanan dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan yang inklusif (Silvia & Syahbudi, 2023).

3.5 Dampak Kebijakan Ekonomi dalam Sistem Demokrasi

Kebijakan ekonomi yang efektif dapat memperkuat legitimasi demokrasi misalnya kebijakan yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, pengembangan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu kebijakan ekonomi yang inklusif mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi sehingga memperkuat hubungan antara rakyat dan pemerintah..

Berdasarkan sistem demokrasi dampak kebijakan ekonomi sangat bergantung pada perencanaannya kebijakan yang berbasis data dan melibatkan partisipasi publik dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat sehingga pemerintah demokratis perlu mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas sosial (Pradana, 2020).

3.6 Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Demokrasi dan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya lebih banyak untuk pembangunan sosial. Berdasarkan perspektif ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja adalah indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat.

Demokrasi dan ekonomi memiliki hubungan yang saling memengaruhi dalam menciptakan kesejahteraan. Demokrasi memberikan platform untuk kebijakan ekonomi yang inklusif,

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

sementara stabilitas ekonomi memperkuat demokrasi dengan menyediakan sumber daya untuk mendukung institusi politik. Namun, jika salah satu elemen ini melemah, kesejahteraan masyarakat dapat terganggu.

Meskipun demokrasi menawarkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, banyak negara menghadapi tantangan seperti ketimpangan pendapatan, korupsi dan populisme. Tantangan Ini dapat menghambat distribusi manfaat ekonomi secara merata sehingga menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat hak dan hal ini menunjukkan perlunya demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Riyanto & Kovalenko, 2023).

3.7 Ketimpangan dalam Demokrasi dan Ekonomi

Ketimpangan dalam demokrasi dan ekonomi sering kali menjadi tantangan besar dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sehingga dalam konteks demokrasi ketimpangan terjadi ketika akses terhadap partisipasi politik tidak merata contohnya akibat dominasi kelompok elit atau rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat miskin sehingga ketimpangan ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat. Sisi ekonomi ketimpangan biasanya terlihat dalam distribusi kekayaan yang tidak merata di mana sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar sumber daya sehingga hal ini berdampak pada kesempatan tidak setara bagi individu atau kelompok tertentu dalam akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Ketimpangan ekonomi juga dapat memperburuk ketimpangan dalam demokrasi karena kelompok kaya memiliki lebih banyak pengaruh dalam politik baik melalui pendanaan kampanye maupun akses ke pembuat kebijakan.

Ketimpangan dalam demokrasi dan ekonomi seringkali memperkuat ketika kelompok tertentu mendominasi ekonomi. Mereka cenderung menggunakan kekuatan finansialnya untuk mengontrol proses politik demi mempertahankan statusku sehingga sebaliknya demokrasi yang tidak inklusif seringkali gagal menghasilkan kebijakan redistribusi yang diperlukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Siklus ini menciptakan jurang sosial yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin. Namun, ketimpangan ini bukanlah hal yang tidak dapat

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

diatasi banyak upaya untuk mengurangi ketimpangan dalam demokrasi melibatkan peningkatan literasi politik dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan akses informasi. Sementara itu ketimpangan ekonomi dapat dikurangi melalui kebijakan fiskal progresif seperti pajak yang lebih tinggi untuk kelompok kaya serta program subsidi yang mendukung kelompok rentan (Ulfyyati Alifa et al., 2023).

3.8 Rekomendasi Strategis untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pendekatan strategis yang melibatkan berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan serta pada sektor pemerintahan. Salah satu langkah awal yang penting adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di mana manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat hal ini dapat dilakukan dengan mendorong investasi di sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja seperti industri kecil dan menengah, pertanian dan teknologi..

Layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan peran pemerintah perlu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap Fasilitas Kesehatan termasuk melalui program asuransi kesehatan nasional. Selain itu upaya pencegahan seperti kampanye kesehatan dan promosi gaya hidup sehat dapat membantu mengurangi beban penyakit di masyarakat. Untuk mendukung upaya ini tata kelola pemerintah yang baik menjadi sangat penting. Transparansi , akuntabilitas dan partisipasi publik harus menjadi pilar utama dalam pembuatan kebijakan di mana pemerintah juga harus memperkuat institusi institusi negara agar mampu melaksanakan program-program kesejahteraan secara efektif dan efisien tanpa terjebak dalam praktik korupsi atau inefisiensi.

Terakhir, kerjasama antara sektor publik dan swasta dapat memberikan dampak positif yang signifikan contohnya pemerintah dapat bermitra dengan perusahaan swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, menceritakan lapangan kerja dan danai program-program sosial melalui kombinasi strategi ini kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur dan harmonis (Malatisuka, 2021).

KESIMPULAN

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam proses demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk Menyusun kebijakan publik yang inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat sehingga ketika demokrasi berjalan dengan baik keadilan sosial dapat diwujudkan melalui perlindungan hak asasi manusia, pemerataan sumber daya dan pengangguran ketimpangan.

Berdasarkan sisi lain, pertumbuhan ekonomi Menyediakan dasar yang kuat untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan sehingga ekonomi yang tumbuh secara inklusif mampu menciptakan lapangan kerja secara dapat mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap partisipasi politik seringkali menjadi penghalang utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata. Sehingga, diperlukan sinergi antara pembangunan demokrasi dan kebijakan ekonomi yang berkeadilan untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara luas.

SARAN

Peningkatan kesehatan masyarakat memerlukan langkah strategis yang melibatkan berbagai aspek contohnya pendidikan politik dan ekonomi perlu ditingkatkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam demokrasi serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. F., Enala, S. H., Kontu, F., & Prasetya, M. N. (2023). Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik dan Kebijakan Publik. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 165. <https://doi.org/10.33633/ja.v6i1.1017>
- Agustinus Gulo. (2023). Revitalisasi Budaya Di Era Digital Dan Eksplorasi Dampak Media Sosial Terhadap Dinamika Sosial-Budaya Di Tengah Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan*

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

-
- Kebudayaan (JURDIKBUD)*, 3(3), 172–184. <https://doi.org/10.55606/jurdikbud.v3i3.2655>
- Alisha, W. P., & Yulhendri, Y. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 4(4), 581. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v4i4.12455>
- Heldi, Abdil Raulaelika Fauzan, Akshal Heldiansyah Ripdia, & Asyifa Zahra. (2021). Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.58>
- Hudi, M. (2020). Peran Politik dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(03), 232–248. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2172>
- Mahmudah, L., & Hastriana, A. Z. (2024). Dampak Pendapatan Usaha Kecil Menengah terhadap Kesejahteraan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen*, 3(1), 299–314. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i1.2101>
- Malatisuka, D. I. D. (2021). *Pendahuluan*. 8, 22–45.
- Mayasari, F., & Mahinshapuri, Y. F. (2022). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JEB17: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(02), 119–132. <https://doi.org/10.30996/jeb17.v7i02.7362>
- Pradana, R. A. (2020). Sosial, Politik, dan Ekonomi Kesejahteraan Sosial: Refleksi Demokrasi dan Fenomena Sosial Indonesia. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 87–101. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3717>
- R. Stevanus Bayu Mangkurat, R. M. (2021). Journal of Government and Politics. *Journal of Government and Politics*, 3(2), 135–171. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Saputra, M. R., Setiadi, W., Thohari, A. A., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). *Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai di Indonesia dan Dampaknya terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. 2(4).

Received : 2024-12-05

Revised : 2024-12-12

Available online : 2025-01-01

<https://ojs.stiemkalianda.ac.id>

Silvia, F., & Syahbudi, M. (2023). Tantangan Dan Peluang: Peran Ekonomi Dalam Peningkatan Pelayanan Publik. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01(12), 90–100.

Souwakil, K. (2024). Sosialisasi Pengendalian Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *TheJournalish: Social and Government*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.55314/tsg.v5i1.699>

Ulfiyyati Alifa, Muhamad Ridho, Barri Mulki fathur, & Akbari Ilham Sultan. (2023). Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, DanProspek Masa Depan. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 435–444. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/48>